



Aktivitas Manajemen Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Nonformal di Kota Medan

Sifa Maulida¹, Amiruddin Siahaan²

¹⁻²Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

E-mail: ¹syifamaulida298@gmail.com, ²amiruddin.siahaan@gmail.com

Korespondensi penulis : syifamaulida298@gmail.com*

Abstract: This study aims to analyze the role of Islamic education management in women's empowerment through non-formal education in Medan City, focusing on the programs of the Women, Youth, and Family Commission (KPRK) of the Indonesian Ulama Council (MUI). Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation, interviews, and documentation involving KPRK leaders and training participants. The results indicate that KPRK MUI Medan implements Islamic education management principles—planning, organizing, actuating, and evaluating—in its non-formal education programs, such as the Female Ulama Cadre Education (PKU-P). These programs enhance women's religious literacy, leadership skills, and social participation, aligning with Islamic values of *ta'dib* (moral development) and *tarbiyah* (holistic education). The study concludes that non-formal education is an effective strategy for empowering women in religious and social contexts, addressing structural and cultural barriers.

Keywords: Islamic Education Management, KPRK MUI, Non-Formal Education, Women's Empowerment.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen pendidikan Islam dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan nonformal di Kota Medan, dengan fokus pada program Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang melibatkan pengurus KPRK dan peserta pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPRK MUI Medan menerapkan prinsip manajemen pendidikan Islam—perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi—pada program nonformal seperti Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKU-P). Program ini meningkatkan literasi keagamaan, kepemimpinan, dan partisipasi sosial perempuan, selaras dengan nilai-nilai Islam seperti *ta'dib* (pembinaan akhlak) dan *tarbiyah* (pendidikan holistik). Simpulan penelitian menyatakan bahwa pendidikan nonformal efektif sebagai strategi pemberdayaan perempuan dalam konteks keagamaan dan sosial, mengatasi hambatan struktural dan kultural.

Kata kunci: Manajemen Pendidikan Islam, Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Nonformal, KPRK MUI.

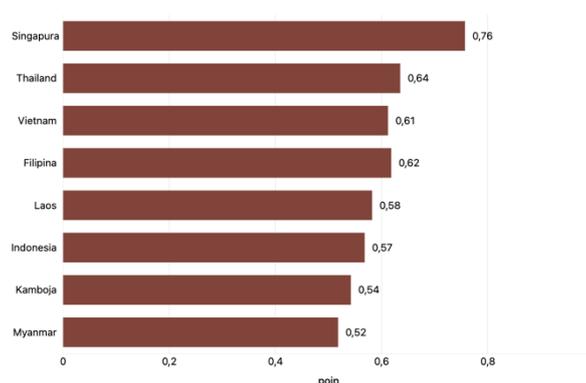
1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, perempuan memainkan peran strategis dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Pendidikan nonformal sebagai salah satu jalur dalam system pendidikan nasional yang memiliki peranan penting dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dijelaskan Coombs (dalam Sudjana, 2004: 22-23). Pendidikan non formal adalah setiap kegiatan yang terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya. Melalui bidang pendidikan, dapat dilakukan berbagai bentuk pelatihan Pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga

kecakapan, kemampuan dan keahlian masyarakat dapat meningkat. Dimulai dari lingkup yang terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga sehingga dengan mandiri masyarakat dapat menghadapi problematika hidup.

Pemberdayaan perempuan merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan religius. Apalagi perempuan Indonesia sering menghadapi tantangan struktural dan kultural seperti ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, serta dominasi tafsir keagamaan yang patriarkal.

Hal serupa ditegaskan oleh *Data United Nations Development Programme* (UNDP) menunjukkan, skor Indeks Pemberdayaan Perempuan atau *Women's Empowerment Index* (WEI) 2022 yang diperoleh Indonesia sebesar 0,568 poin dari skala 0-1 poin. Dari penilaian itu, UNDP menggolongkan Indonesia ke dalam kelompok pemberdayaan perempuan rendah di dunia. Bahkan dalam wilayah yang lebih spesifik seperti di *Association of Southeast Asian Nations* atau ASEAN, Indonesia hanya mampu bertengger di posisi keenam.



Gambar 1. Skor Indeks Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan data tersebut, Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) MUI Kota Medan, melalui berbagai program pendidikan non-formalnya seperti Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKU-P), telah berupaya menjawab kebutuhan tersebut. Melalui pendekatan manajemen pendidikan Islam, program ini tidak hanya membina aspek spiritual perempuan, tetapi juga membentuk kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan kepekaan sosial mereka. Sehingga dengan adanya penelitian ini mampu menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1) bagaimanakah aktivitas manajemen pendidikan islam dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan nonformal di Kota Medan? 2) Peran Pendidikan Nonformal terhadap Pemberdayaan Perempuan. Dengan tujuan untuk

mengkaji aktivitas manajemen pendidikan Islam dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan nonformal di Kota Medan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Secara teoritis, menurut Denzin & Lincoln sebagaimana yang dikutip oleh Anggito et al. (2018), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang didasarkan data dari latar belakang yang alami dengan tujuan untuk memahami fenomena yang muncul dan menggunakan berbagai metode terkait untuk analisisnya. (Salsabila & Hertati, 2022). Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami aktivitas manajemen pendidikan Islam dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan nonformal di Kota Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Observasi dilakukan oleh peneliti langsung mendatangi Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) MUI Sumatera Utara untuk memperoleh dan mengetahui aktivitas manajemen pendidikan Islam dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan nonformal di Kota Medan. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber kunci seperti Ketua Bidang KPRK MUI Kota Medan dan peserta pelatihan dengan menggunakan metode *purposive* sampling. Dalam penelitian kualitatif, teknik *purposive* sampling adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Tidak ada batasan jumlah responden untuk menentukan sampel secara *purposive*, dengan harapan informasi yang diinginkan dapat diperoleh dan dihasilkan (Bernard, 2002). Studi dokumentasi dilakukan dengan dokumen-dokumen resmi Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) MUI Sumatera Utara baik dalam format *online* maupun *offline*, serta artikel, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pendidikan Islam

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *management*, yang secara harfiah bermakna pengaturan, pengelolaan, atau kepemimpinan (Anonim, 2011). Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus Inggris-Indonesia, kata ini berakar dari to *manage*, yang mencakup makna

mengurus, mengendalikan, menjalankan, atau menangani suatu hal. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan manajemen sebagai pemanfaatan sumber daya secara efisien guna mencapai tujuan tertentu.

Dalam bahasa Arab istilah manajemen diartikan sebagai an-nizam atau at-tanzim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Sajdah: 5

وَدَبَّرَ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (Al Sajdah : 05)

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (*manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Secara praktis, manajemen dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang meliputi penertiban, pengaturan, dan penalaran yang dilakukan individu untuk mengorganisasi, menata, serta menyusun berbagai elemen di sekitarnya secara sistematis. Sementara itu, dari perspektif terminologis, para ahli memberikan beragam definisi tentang manajemen, di antaranya:

- a) Menurut Siagian (1990), manajemen merupakan suatu kemampuan atau keterampilan untuk mencapai tujuan tertentu melalui koordinasi dengan orang lain. Proses ini mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar manajemen serta upaya menciptakan harmoni dalam interaksi sosial.
 - b) Manaf (2001) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.
- b. Dasar-Dasar Organisasi: Sebuah Tinjauan Konseptual

Organisasi merupakan suatu entitas dinamis yang terbentuk melalui proses interaksi dan sinergi antar individu dalam suatu wadah kolektif untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah dirumuskan secara partisipatif (Amiruddin Siahaan, 2022).

Sebagai suatu sistem yang kompleks, organisasi tersusun atas berbagai komponen fundamental yang saling berinteraksi dalam kerangka manajemen proyek, meliputi:

- a) Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai inti dari organisasi, di mana keberadaan sekelompok individu dengan kompetensi beragam menjadi prasyarat mutlak, dengan figur kepemimpinan yang berfungsi sebagai pengarah dan pemersatu.
- b) Visi dan Misi Organisasi yang berperan sebagai kompas strategis, baik dalam pencapaian target operasional harian maupun sasaran strategis jangka panjang yang bersifat transformatif.
- c) Stratifikasi Peran yang menegaskan spesialisasi fungsi, di mana setiap aktor organisasional menempati niche tertentu dalam hierarki berdasarkan kapabilitas dan delegasi wewenang.
- d) Mekanisme Pembagian Kerja yang mengatur alokasi tanggung jawab secara sistematis, menjamin setiap komponen organisasi berkontribusi sesuai domain keahliannya.
- e) Infrastruktur Teknologi sebagai enabler kritis yang memfasilitasi transformasi data mentah menjadi intellectual capital melalui proses agregasi dan analisis berbasis inovasi.
- f) Arsitektur Organisasional yang berfungsi sebagai blue print operasional, mengatur mekanisme koordinasi lintas fungsi sekaligus menjadi landasan tata kelola kolaborasi.
- g) Dinamika Eksternalitas berupa faktor makro seperti regulasi pemerintah, tren industri, dan ekosistem kompetitif yang secara signifikan mempengaruhi daya adaptasi dan sustainability organisasi.

Pemahaman holistik terhadap ketujuh pilar organisasional ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga preskriptif dalam merancang organisasi yang resilient di tengah turbulensi lingkungan bisnis kontemporer. Implementasinya memerlukan pendekatan sistemik yang memadukan ketajaman analitis dengan fleksibilitas operasional, sehingga tercipta organisasi yang tidak hanya efisien secara internal tetapi juga responsif terhadap perubahan eksternal.

c. Pengertian Pendidikan Islam

Sebelum mendefinisikan pendidikan Islam, penting untuk meninjau makna pendidikan secara umum. Dalam bahasa Indonesia, istilah "pendidikan" berasal dari kata dasar "didik" yang mendapat imbuhan awalan "pe-" dan akhiran "-an", membentuk kata benda yang merujuk pada suatu proses atau tindakan mendidik. Asal-

usul konsep ini dapat ditelusuri hingga bahasa Yunani kuno, yaitu *paedagogie*, yang secara harfiah berarti bimbingan bagi anak. Istilah tersebut kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris sebagai *education*, yang mencakup makna pengembangan potensi dan pembinaan diri (Mustali, 2014).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan didefinisikan sebagai upaya mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok melalui pengajaran dan pelatihan, dengan tujuan mencapai kedewasaan. Sementara itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik mengaktualisasikan potensi diri. Hal ini mencakup penguatan aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna bagi kehidupan pribadi dan sosial.

Dalam bahasa Arab pendidikan disebut tarbiyah yang diambil dari kata *Rabbay-arubbu-Tarbiyah* yang bermakna tumbuh dan berkembang atau bertambah yaitu upaya menumbuhkan kembangkan atau menambah (menghidupkan) potensi manusia. Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Is'ra ayat 24

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

yang artinya : *Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya karena belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil."*

Para ahli telah memberikan berbagai definisi mengenai Pendidikan Islam, masing-masing dengan penekanan yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah:

- Pendidikan Islam sebagai Pengembangan Potensi Manusia
Menurut Daulay (2004), Pendidikan Islam pada hakikatnya bertujuan membentuk kepribadian Muslim yang utuh, dengan mengoptimalkan seluruh aspek potensi manusia, baik jasmani maupun rohani.
- Pendidikan Islam sebagai Proses Pembimbingan Praktis
Zuhairini (1983) mendefinisikan Pendidikan Agama Islam sebagai upaya sistematis dan pragmatis untuk membimbing peserta didik agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

- Pendidikan Islam sebagai Arahan Pengembangan Diri

Sementara itu, Ahmad Tafsir (2005) memandang Pendidikan Islam sebagai bentuk bimbingan yang diberikan kepada individu agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam merupakan suatu proses terencana yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh dimensi manusia-fisik, akal, dan spiritual-sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga menghasilkan pribadi Muslim yang paripurna dan mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata.

d. Pengertian Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam telah didefinisikan oleh berbagai ahli dengan penekanan pada pengelolaan lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Menurut Sulistyorini (2006), manajemen pendidikan Islam merupakan suatu sistem pengaturan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia (baik Muslim maupun non-Muslim) serta sarana pendukung lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara optimal.

Sementara itu, Mujamil Qomar (2008) mendefinisikannya sebagai upaya pengelolaan institusi pendidikan Islam secara Islami dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan unsur terkait guna mewujudkan tujuan pendidikan secara efisien. Perbedaan utama antara manajemen pendidikan Islam dan manajemen umum terletak pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaannya.

Ramayulis menambahkan bahwa manajemen pendidikan Islam mencakup pemanfaatan seluruh sumber daya—baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana—yang dimiliki oleh umat Islam atau lembaga pendidikan. Proses ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengoptimalan sumber daya melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan berdaya guna. Sementara itu, pendidikan Islam sendiri merupakan upaya penanaman nilai-nilai Islam kepada peserta didik sebagai bekal meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Manajemen Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Nonformal Di Kota Medan

Pemberdayaan dan memberdayakan merupakan terjemahan dari kata "*empowerment*" dan "*empower*" menurut *Webster* dan *Oxford English Dictionary*, kata *empower* mengandung pengertian pertama adalah *to give power or authority to* yang artinya sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan arti yang kedua adalah *to give ability to or enable* yaitu sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Konsep pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan yang lebih mengasentasikan sifat-sifat "*people centered, participatory empowering sustainable*". Walaupun pengertiannya berbeda namun tetap mempunyai tujuan yang sama. Yaitu untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta adanya upaya mengembangkan kearah yang lebih baik.

Sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Pendidikan nonformal adalah bentuk pendidikan yang tidak terikat pada kurikulum dan struktur pendidikan formal. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2020), pendidikan nonformal mencakup berbagai bentuk pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, termasuk perempuan. Program pendidikan nonformal ini menjadi solusi bagi perempuan yang tidak memiliki akses pendidikan formal, baik karena faktor ekonomi, budaya, maupun sosial.

Seperti yang sudah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya (QS. An-Nahl ayat 97): Al Qur'an Surah An-Nahl Ayat: 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

"Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Kami akan memberi balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Kota Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki lebih dari 50% populasi perempuan (BPS Kota Medan, 2023). Walaupun jumlah perempuan yang besar, mereka menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan yang setara. Hal ini menciptakan ketimpangan gender yang dapat menghambat partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan nonformal melalui program seperti Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKU-P) dapat menjadi sarana untuk membantu perempuan di Kota Medan mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, *7 Rajab 1395 Hijriah*, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun.

Aktivitas Manajemen Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Nonformal Di Kota Medan

Aktivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keaktifan, kegiatan-kegiatan, kesibukan atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian dalam tiap suatu organisasi atau lembaga (Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, 2005: 23).

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas, kegiatan, atau kesibukan yang dilakukan manusia. Berarti atau tidaknya kegiatan tersebut tergantung pada individu tersebut. Menurut Samuel Soeitoe dalam bukunya Psikologi Pendidikan II mengatakan bahwa aktivitas tidak hanya sekedar kegiatan, tetapi aktivitas dipandang sebagai usaha mencapai atau memenuhi kebutuhan (Samuel, 1982: 52).

Salah satu kebutuhan manusia adalah menuntut ilmu untuk menjadi orang yang pandai dan sukses. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus belajar dengan cara bersekolah atau mengikuti majlis atau tempat-tempat ilmu, membaca buku, berdiskusi dan melakukan kegiatan lainnya. Misalnya seseorang yang ingin mendalami ilmu agama dan hubungan interaksi masyarakat yang Islami, maka ia harus melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mewujudkan keinginan tersebut. Aktivitas yang dilakukan dengan membaca buku-buku agama, mengikuti pengajian-pengajian, melakukan diskusi-diskusi tentang

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ridhoi *Allah Subhanahu wa Ta'ala*;
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- 3) Menjadi penghubung antara *ulama* dan *umaro* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian — dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh — kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam (Ardiansyah, dkk. 2020). Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi *ulama*, *zuama* dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (Rahmat bagi Seluruh Alam).

Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan merupakan salah satu komisi di bawah MUI yang berfokus pada isu-isu perempuan, anak muda, dan keluarga. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi keagamaan, pembinaan akhlak, hingga pelatihan life skill kepada masyarakat, terutama kaum perempuan.

Meskipun bukan lembaga pendidikan formal, namun aktivitas yang dijalankan oleh KPRK melalui program seperti Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKU-P) bersifat edukatif dan termasuk dalam ranah pendidikan non-formal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip manajemen pendidikan Islam.

Analisis Aktivitas Manajemen Pendidikan Islam di KPRK MUI

Aktivitas merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks pendidikan Islam, aktivitas manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program yang berbasis nilai-nilai keislaman (Depdikbud, 2005). Samuel Soeitoe (1982) menegaskan bahwa aktivitas tidak hanya sekadar kesibukan, melainkan upaya pemenuhan kebutuhan, termasuk kebutuhan intelektual dan spiritual.

Dalam konteks ini, Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan telah menunjukkan peran yang signifikan sebagai lembaga yang tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan semata, tetapi juga pada upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, melalui pendekatan pendidikan nonformal. Meskipun KPRK tidak beroperasi dalam kerangka pendidikan formal, berbagai program yang dijalankannya, seperti Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKU-P), memiliki nilai edukatif yang tinggi dan sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam.

Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKU-P) merupakan salah satu program unggulan KPRK MUI Kota Medan yang dirancang khusus untuk membekali perempuan dengan pengetahuan keislaman yang mendalam sekaligus mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka. Program ini tidak hanya terbatas pada pengajaran teks-teks keagamaan tradisional, tetapi juga mencakup pembahasan isu-isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan perempuan modern, seperti hak-hak perempuan dalam Islam, peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi perempuan di era digital. Kurikulum PKU-P disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks sosial yang nyata. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat partisipatif, melibatkan diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi, sehingga peserta dapat mengembangkan kemampuan analitis dan problem-solving mereka.

Dari perspektif manajemen pendidikan Islam, pelaksanaan PKU-P mencerminkan prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien. Tahap perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan peserta yang mendalam, termasuk latar belakang pendidikan, tingkat pemahaman keagamaan, serta tantangan spesifik yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi dasar untuk menyusun materi pembelajaran yang relevan dan menarik. Selain itu, KPRK juga melakukan seleksi

ketat terhadap para mentor dan fasilitator yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki pengalaman praktis dalam pemberdayaan perempuan. Tahap pengorganisasian meliputi pembagian tugas yang jelas di antara tim pengelola, mulai dari koordinator program, mentor, hingga tim logistik, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap pelaksanaan, PKU-P tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan praktis. Misalnya, peserta diajak untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial, seperti penyuluhan kesehatan reproduksi, pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga, atau kampanye pendidikan bagi anak-anak marginal. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman peserta, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan di masyarakat. Evaluasi program dilakukan secara berkala melalui berbagai metode, seperti kuesioner, diskusi kelompok terfokus, dan observasi partisipatif, untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, kepuasan mereka terhadap program, serta dampak program pada kehidupan pribadi dan sosial mereka. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan.

Selain PKU-P, KPRK MUI Kota Medan juga menjalankan berbagai program lain yang bersifat edukatif dan transformatif, seperti pelatihan keterampilan usaha kecil bagi perempuan, seminar kesehatan keluarga, dan workshop parenting berbasis nilai-nilai Islam. Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis masyarakat sekaligus memperkuat fondasi spiritual mereka. Dalam konteks yang lebih luas, aktivitas KPRK juga mencerminkan integrasi antara visi keumatan dan kebangsaan, di mana lembaga ini tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai mediator antara umat dan pemerintah, serta penggerak kerukunan sosial.

Secara keseluruhan, aktivitas manajemen pendidikan Islam di KPRK MUI Kota Medan merupakan contoh nyata dari penerapan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang holistik dan inklusif. Melalui pendekatan yang sistematis dan kontekstual, KPRK berhasil menciptakan ruang belajar yang memberdayakan, khususnya bagi perempuan, sekaligus berkontribusi pada penguatan masyarakat yang berakhlak dan produktif. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap tahapan manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga tujuan pendidikan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dapat terwujud secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, KPRK MUI Kota Medan telah menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak harus terbatas pada lingkup formal, tetapi dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan nonformal yang kreatif dan adaptif. Program seperti PKU-P tidak hanya membekali perempuan dengan pengetahuan keagamaan, tetapi juga mengembangkan kapasitas mereka sebagai pemimpin dan agen perubahan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, di mana pendidikan dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan Manajemen Pendidikan Islam dalam Program KPRK

Proses penerapan manajemen pendidikan Islam dalam program-program Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) MUI Kota Medan dilaksanakan melalui empat fungsi manajerial utama yang saling terkait. Tahap pertama dalam implementasi ini adalah perencanaan yang dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan masyarakat, terutama kalangan perempuan. Proses perencanaan diawali dengan kegiatan analisis kebutuhan melalui serangkaian survei dan forum diskusi bersama masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi perempuan muslimah di wilayah tersebut, seperti tingkat pemahaman keagamaan yang masih rendah, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta minimnya peran perempuan dalam kegiatan dakwah. Berdasarkan analisis kebutuhan ini, KPRK kemudian merumuskan tujuan-tujuan strategis program, salah satunya melalui Program Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKU-P) yang bertujuan mencetak kader-kader perempuan yang kompeten dalam bidang dakwah dan kepemimpinan komunitas, sejalan dengan visi besar MUI dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia.

Pada tahap pengorganisasian, KPRK MUI Kota Medan membentuk struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terukur. Struktur ini melibatkan berbagai unsur mulai dari Dewan Pakar yang terdiri dari para ulama dan akademisi yang bertanggung jawab dalam penyusunan materi pendidikan, Tim Pelaksana yang terbagi dalam divisi program, humas, dan logistik untuk menjalankan operasional kegiatan, hingga relawan-relawan yang umumnya berasal dari kalangan mahasiswa atau aktivis yang bertugas dalam pendampingan peserta. Untuk memperluas cakupan dan dampak program, KPRK juga membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai institusi seperti pesantren, organisasi massa Islam (Aisyiyah, Muslimat NU), serta instansi pemerintah terkait (Kemenag, Dinas PPPA). Dalam hal pemanfaatan sumber daya, KPRK

memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia seperti masjid, aula komunitas, maupun platform daring sebagai media pembelajaran.

Pelaksanaan program-program KPRK menerapkan pendekatan yang partisipatif dan berlandaskan nilai-nilai Islami. Metode pembelajaran yang digunakan sangat bervariasi, mulai dari ceramah interaktif dengan pola diskusi tanya jawab untuk materi-materi keagamaan, praktik langsung berbagai bentuk ibadah seperti tata cara shalat dan membaca Al-Qur'an, hingga pelatihan-pelatihan keterampilan praktis seperti kewirausahaan dan pemasaran digital. Pendekatan psikologis turut diperhatikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan karakteristik peserta yang beragam, mulai dari ibu rumah tangga hingga remaja putri. Setiap kegiatan selalu diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah seperti semangat kerja sama dan kejujuran dalam berinteraksi.

Fungsi pengawasan dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis melalui berbagai mekanisme. Monitoring rutin dilakukan dengan mencatat tingkat kehadiran peserta dan mengumpulkan umpan balik melalui kuesioner maupun diskusi kelompok. Evaluasi hasil pembelajaran mencakup tiga aspek utama: aspek kognitif yang diukur melalui tes lisan maupun tertulis untuk menilai pemahaman materi keagamaan, aspek afektif yang diamati melalui perubahan perilaku peserta seperti meningkatnya partisipasi dalam kegiatan majelis taklim, serta aspek psikomotorik yang dinilai dari penguasaan keterampilan praktis seperti kemampuan memimpin pengajian. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi bahan untuk tindak lanjut, di mana peserta yang menunjukkan prestasi baik akan diberi kesempatan menjadi mentor pada program berikutnya, sementara berbagai kendala yang teridentifikasi seperti kurangnya ketersediaan modul pembelajaran akan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan perencanaan program di masa mendatang.

Peran Pendidikan Non-Formal dalam Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait, dapat diketahui bahwa Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan telah secara efektif memanfaatkan pendekatan pendidikan nonformal sebagai instrumen strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan. Pendekatan ini terbukti mampu menjangkau berbagai kalangan perempuan dengan latar belakang yang beragam, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan kapasitas individu maupun kolektif.

Secara lebih rinci, implementasi pendidikan non-formal oleh KPRK MUI Kota Medan menghasilkan beberapa bentuk pemberdayaan yang konkret bagi perempuan. Pertama, program-program yang dilaksanakan berhasil meningkatkan literasi keagamaan dan spiritualitas perempuan, yang menjadi fondasi penting dalam membentuk pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban mereka dalam perspektif Islam. Kedua, melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan, KPRK berhasil mengembangkan potensi perempuan dalam membangun keluarga sakinah, yakni keluarga yang tidak hanya harmonis secara sosial tetapi juga kuat secara spiritual. Ketiga, perempuan juga dibekali dengan berbagai keterampilan sosial dan kepemimpinan yang memungkinkan mereka untuk berperan lebih aktif baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Keempat, KPRK menyediakan ruang aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman (curhat), mendapatkan bimbingan, dan layanan konseling, yang sangat penting dalam mengatasi berbagai persoalan psikologis dan sosial yang mereka hadapi.

Dampak dari pendekatan pendidikan non-formal ini terlihat jelas dalam transformasi yang dialami oleh para peserta. Perempuan yang sebelumnya cenderung pasif dan terbatas perannya dalam ruang domestik, kini telah berubah menjadi individu yang aktif dan produktif dalam komunitas. Mereka tidak hanya menjadi subjek pembangunan tetapi juga berperan sebagai penggerak perubahan (*agent of change*) di lingkungan masing-masing. Selain itu, keterlibatan mereka dalam berbagai program KPRK telah berkontribusi pada terciptanya lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan religius. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan non-formal tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana transformasi sosial yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku perempuan ke arah yang lebih positif dan memberdayakan.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan non-formal memiliki peran yang sangat vital dalam upaya pemberdayaan perempuan, khususnya dalam konteks masyarakat yang kompleks dan dinamis seperti Kota Medan. Melalui pendekatan yang fleksibel dan adaptif, KPRK MUI Kota Medan telah membuktikan bahwa pendidikan non-formal dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perempuan, sekaligus memaksimalkan potensi mereka sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan demikian, upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan nonformal tidak hanya relevan secara konseptual tetapi juga aplikatif dalam praktik, sehingga layak untuk dikembangkan dan diperluas cakupannya ke berbagai wilayah lainnya.

Diskusi dan Keterkaitan dengan Teori

Temuan ini sejalan dengan teori manajemen pendidikan Islam yang menekankan pentingnya tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi dalam kegiatan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan KPRK MUI juga membuktikan bahwa pendidikan non-formal mampu menjangkau kelompok-kelompok yang tidak tersentuh pendidikan formal, khususnya perempuan marginal dan ibu rumah tangga.

Secara teoritis, pendekatan ini mencerminkan konsep *ta'dib* (pembinaan akhlak dan karakter) dan *tarbiyah* (pendidikan berkelanjutan), yang merupakan ruh dari manajemen pendidikan Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat aktivitas yang dilakukan KPRK MUI tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis peserta, tetapi juga mengembangkan kemampuan personaliti yang sangat penting dalam lingkup global. Peserta pendidikan mendapatkan manfaat dari program pelatihan yang mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap profesional. Hal ini mempersiapkan mereka untuk berhasil dalam pasar kerja yang semakin kompetitif dan dinamis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) MUI Medan memainkan peran strategis dalam membina, memberdayakan, dan mendampingi perempuan, remaja, dan keluarga melalui pendekatan dakwah, pendidikan, serta penguatan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Program Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKU-P) menjadi pilar utama dalam proses pemberdayaan perempuan. Program ini tidak hanya bertujuan mencetak ulama perempuan, namun juga memperkuat kapasitas perempuan sebagai pemimpin di komunitas keagamaan dan sosial. Pendekatan manajemen pendidikan Islam yang diterapkan oleh KPRK MUI Medan mencakup perencanaan program yang responsif terhadap isu kontemporer, pelaksanaan yang partisipatif, serta evaluasi berbasis dampak nyata di masyarakat. Pendekatan ini menjadikan proses pemberdayaan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk menunjang bagi MUI dan Komisi sejenis di daerah lain, pendekatan yang dilakukan KPRK MUI dapat dijadikan contoh atau model dalam mengembangkan program pemberdayaan berbasis nilai-nilai keislaman, dengan fokus pada perempuan dan keluarga.

Bagi pemerintah dan lembaga pendidikan Islam, perlu dilakukan sinergi lebih lanjut dengan MUI dan komisi terkait untuk mendukung kaderisasi ulama perempuan, khususnya dalam aspek kurikulum, fasilitas, dan pengakuan formal.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lanjutan mengenai dampak jangka panjang program PKU-P terhadap transformasi sosial perempuan di komunitas masing-masing, serta peran alumni PKU-P dalam pembangunan masyarakat berbasis nilai Islam *Rahmatan lil 'Alamin*.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Tafsir. (2011). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Amiruddin Siahaan. (2022). *Analisis metode dan pendekatan dalam manajemen proyek pada dunia pendidikan*. Medan: Edumaspul.
- Anonim. (2011). *Pedoman pemilihan kepala sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2011*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Ardiansyah, dkk. (2020). *Panduan akademik Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU) MUI Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
- Aris. (2022). *Ilmu pendidikan Islam*. Cirebon: Yayasan Wiyata Bestari Samasta.
- Bernard, H. R. (2002). *Research methods in cultural anthropology: Qualitative and quantitative*. Walnut Creek, California: AltaMira Press.
- Daulay, P. H. (2004). *Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Medan. (2022). *Laporan tahunan pemberdayaan perempuan di Kota Medan*. Medan: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Medan.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. (2019). *Pendidikan nonformal dan informal: Strategi dan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hubeis, A. V. S. (2010). *Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa*. Bogor: IPB Press.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Manaf, H. S. (2001). *Pola manajemen penyelenggaraan pondok pesantren*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag Republik Indonesia.
- Manurung, S. R. R. W., Siahaan, A., Syukri, M., & Keling, M. (2023). Implementasi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pendidik di MAN Asahan. *Research and Development Journal of Education*, 9(2), 999. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.19517>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif (Teori dan aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
- Prastowo. (2020). *Panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Qomar, M. (2008). *Manajemen pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Salsabila, S. I., & Hertati, D. (2022). Efektivitas program pelatihan berbasis kompetensi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di UPTD BLK Kabupaten Kotawaringin Timur. *Perspektif*, 11(4), 1360–1368. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7933>
- Siagian, S. P. (1990). *Filsafah administrasi*. Jakarta: CV Masagung.
- Soeitoe, S. (1982). *Psikologi pendidikan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soetrisno, L. (1997). *Kemiskinan, perempuan, pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sudjana. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sulistiyorini. (2006). *Manajemen pendidikan Islam*. Surabaya: elKAF.
- UNESCO. (2019). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Zuhaerini. (1983). *Metodik khusus pendidikan agama*. Surabaya: Usaha Nasional.